

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: PBB Rp9,3 Miliar Belum Dibayar, Hingga Akhir Tahun 2018 Pemkot Bandung Bebaskan Denda
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.3
Edisi	: Jumat, 07 Desember 2018

## PBB Rp 93 Miliar Belum Dibayar

### Hingga Akhir Tahun 2018 Pemkot Bandung Bebaskan Denda

#### **BANDUNG, (PR).**-

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung memperkirakan masih ada potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp 93 miliar yang belum dibayarkan wajib pajak. Untuk menarik kesadaran wajib pajak, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan peraturan yang membebaskan biaya denda administrasi PBB hingga akhir Desember 2018.

"Kalau (pemenuhan target PAD dari pajak) Rp 2,6 (triliun) saya harus jujur itu kelihatannya sulit, tapi kalau bisa mengimbangi tahun kemarin Rp 2,175 (triliun), saya masih punya angka, mudah-mudahan terealisasi. Kuncinya di PBB," ujar Kepala BPPD Kota Bandung Ema Sumarna, se usai acara Malam Anugerah Pajak 2018, di Bandung, Rabu (5/12/2018) malam.

Sebagian besar wajib pajak yang tercatat belum membayar ada di kategori Buku V, dengan nilai yang harus dibayar Rp 5 juta dan seterusnya. Buku V identik dengan industri, atau objek-objek pajak yang besar. Dari hitungan BPPD, kata Ema, terdapat potensi Rp 93 miliar hingga Rp 120 miliar PBB yang belum disetorkan wajib pajak.

Jika mereka tidak membayar tepat waktu, kata Ema, beban denda bisa merugikan keuangan usaha wajib pajak. Denda keterlambatan sebesar 2% mengancam wajib pajak dengan nilai yang cukup besar.

Bagi pemerintah, kata dia, sisa pajak yang tidak tertagih itu kurang menguntungkan karena pada neraca termasuk piutang. Akan tetapi, jika masih menunggak tahun depan hutang pajak itu masih akan dikejar BPPD Kota Bandung.

Ema menjelaskan, pembebasan denda sudah berlaku mulai 19 November sampai 31 Desember 2018. "Itu hanya denda administrasi. Kita memberikan ruang kepada warga supaya jangan terbebani dengan denda

2% per bulan. Tetapi berlaku hanya sampai penghujung tahun, begitu masuk Januari, itu normal lagi. Makanya kami sangat berharap yang merasa belum memenuhi kewajibannya, ya ditunaikan lah. Coba itu dimanfaatkan," ujarnya.

Ema menuturkan, pajak restoran memiliki catatan baik tahun ini. Dibandingkan tahun lalu, ada peningkatan hingga Rp 42,9 miliar. Di akhir tahun diprediksi bisa mencapai Rp 315 miliar. Sementara pajak hotel akan stagnan di nilai Rp 300 miliar. BPPD Kota Bandung juga menargetkan tambahan pemasukan dari reklame tahun depan seiring dengan berlakunya perwal yang menghitung reklame berdasarkan jumlah tayang.

"Pada 2016 posisi Rp 1,490 (triliun), 2017 Rp 2,175 (triliun) mendongkrak sekitar Rp 700 miliar. Saya yakin kepala daerah semakin leluasa merealisasikan apa yang sudah dijanjikan program kegiatan untuk 2019. (Capaian tahun ini) Saya minimal Rp 2,145 triliun. Tetapi saya masih ada angka harapan Rp 2,243 triliun. Kuncinya di PBB, kalau semua terca-

pai, itu tercapai," ujarnya.

Ema menambahkan, kontribusi pajak daerah bagi APBD Kota Bandung baru 34,4%. Ia berharap persentase di masa mendatang bisa meningkat hingga 40%-50% supaya pemkot bisa lebih leluasa dalam memenuhi aspek pembiayaan pembangunan.

"Tetapi kalau dari total PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita berkontribusi sudah 81%, artinya memang pendapatan Kota Bandung masih tetap di pajak, makanya kita ingin dari tahun ke tahun semakin meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap penghargaan tersebut bisa memicu warga Kota Bandung untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Terutama tepat waktu, baik dari angka juga jumlah. "Kita target tetap harus naik karena kebutuhan pembangunan ke depan semakin meningkat. Karena bagaimanapun pembangunan di Kota Bandung, berdasarkan perolehan pajak," katanya.

(Muhammad Fikry Mauludy)\*\*\*